



**DUGAAN SUAP ALIH FUNGSI HUTAN**

# Annas Sebut Rekom Sudah Sampai ke Menhut

**JAKARTA (HR)**-Gubernur Riau non aktif Annas Maamun mengatakan, surat rekomendasi alih fungsi lahan hutan kawasan industri yang diminta Gulat Manurung sudah sampai ke Menteri Kehutanan saat itu, Zulkifli Hasan. Namun, Annas tak tahu apakah Menhut sudah mengeluarkan izin untuk alih fungsi lahan yang diminta.

"Sudah sampai ke Menteri Zulkifli,"

ujar Annas usai menjalani pemeriksaan di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (17/10).

Meski demikian, Annas tak menyebutkan kapan surat itu sampai ke tangan menteri. Sesuai aturan, untuk perizinan alih fungsi lahan hutan tersebut memang harus ditandatangani Menhut.

...Annas Hal 7

## Annas...

Dari Hal. 1

**TERKAIT** pengakuan Annas Maamun itu, pihak KPK tak mau berspekulasi. Menurut Wakil Ketua KPK Zulkarnain, pengakuan Annas tak cukup bagi KPK untuk membuka penyelidikan baru ke arah Kemenhut.

"Surat ini harus dibedakan, di dalam pidana mana perbuatan pidana, perdata, administrasi negara atau tata usaha negara. Tak boleh kita campur aduk. Kita lihat, pilah, lihat kasusnya secara nyata, setelah info cukup, kita kaitkan dengan ketentuan hukum, ini apa yang terjadi, siapa yang melakukan, kapan, di mana. Nanti kita lihat, sudah dalam ranah pidana apa masih kurang," jelas Zulkarnain.

Menurut Zul, persoalan surat menyurat adalah persoalan administrasi. Tidak bisa langsung disimpulkan ada tindak pidana dalam proses surat perizinan itu.

"Tidak serta merta seperti itu. Bisa terlibat dengan hukum administrasi itu yang banyak salah kaprah. Kalau terlibat, ya terlibat hukum administrasi negara saja, belum berarti dalam arti pidana. Setelah hukum pidana, ada lech terlich itu dengan melawan hukum administrasi negara, tidak serta merta," tegas Zul.

### Bersama Istri

Gubri nonaktif Annas Maamun beserta istri Latifah

Hamun, kembali menjalani pemeriksaan di KPK pada Jumat kemarin. Keduanya diperiksa sebagai saksi untuk tersangka suap alih fungsi lahan, Gulat Manurung.

Sekitar pukul 10.15 WIB, Annas Maamun tampak datang ke Gedung KPK dengan wajah pucat. Ia datang sekitar pukul 10.15 WIB dengan pakaian batik dan dilapis rompi tahanan KPK berwarna orange. Saat ditanya tentang kondisi kesehatannya, Annas hanya diam dan langsung menuju ke Gedung KPK untuk menjalani pemeriksaan.

Sebelumnya, kuasa hukum Annas Maamun, Eva Nora, SH mengatakan, keadaan Annas Maamun sehat, walaupun ia mempunyai penyakit maag yang sering kambuh, sehingga harus diperiksa dokter.

"Pak Annas sehat, walaupun sering penyakit maagnya kambuh," ujarnya Kamis kemarin.

Terkait pemeriksaan Annas Maamun dan istri Latifah Hanum, dibenarkan Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK, Priharsa Nugraha. "Benar Latifah Hanum diperiksa untuk tersangka GM dalam kasus suap terkait pengajuan revisi alih fungsi hutan di Riau tahun 2014 ke Kemenhut," terangnya.

Ditambahkannya, selain

Latifah Hanum, Gubri nonaktif Annas Maamun yang juga sama-sama bersaksi untuk Gulat Manurung. "Selain Latifah Hanum ada juga tersangka AM yang bersaksi untuk tersangka GM dalam kasus yang sama," sebutnya.

Sebagaimana diketahui, hingga saat ini sudah banyak saksi yang diperiksa KPK untuk kasus suap alih fungsi hutan di Riau ini. Sejumlah pejabat telah dimintai keterangannya. Baik yang di pusat maupun di lingkungan Pemprov Riau.

### Panggil 3 Menteri dan Kepala BPN

Pada hari yang sama, KPK juga memanggil tiga kementerian dan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk menyelesaikan tumpang tindih terkait izin lahan hutan yang dijadikan bangunan.

Tumpang tindih izin ini harus segera diselesaikan melalui kerjasama antara kementerian dan lembaga agar tidak ada lagi pejabat yang ditangkap KPK terkait pemberian izin.

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Zulkarnain mengatakan, dipanggilnya Menteri PU, Kemendagri, Kemenhut dan Kepala BPN untuk diajak menandatangani nota kesepahaman atau MoU terkait penyelesaian sengketa terkait kawasan hutan. Menu-

rutnya, MoU ini sudah dilaksanakan 12 kementerian pada tanggal 13 Maret menyangkut tata kelola kawasan hutan di Indonesia.

Inspektur Jenderal Kemendagri Maliki Heru Santoso mengatakan, peraturan bersama ini diharapkan dapat meminimalisir konflik-konflik horizontal mengenai permasalahan tanah yang tumpang tindih di kawasan hutan.

Untuk itu, Kemendagri akan meminta kepada seluruh kepala daerah agar bisa menyukseskan peraturan-peraturan terkait pertanahan atau kehutanan dengan peraturan ini.

Sedangkan Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto mengatakan, pihaknya akan menindaklanjuti dari apa yang sudah disepakati antara Kementerian terkait dengan KPK. Menurutnya, di daerah itu terkadang batasan wilayah dan batasan hutan belum jelas. Untuk itu dengan adanya kerja sama ini, Kemenhut dapat meninjau langsung akar permasalahannya.

Sementara itu, Kepala BPN Hedarman Supandji mengatakan, BPN memberikan apresiasi atas semangat KPK tersebut. Menurutnya, MoU tersebut bisa mencegah terjadinya sengketa lahan yang berkepanjangan. (bbs, rtc, dtc, ant, int)